



Peluang Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih Berbasis Potensi Lokal Di Wilayah Perkotaan: Studi Kasus Kota Mataram

Dyah Ayu Suryaningrum¹, M. Alwi Shahab², Farah Ainun Jamil³, Sab'ul Masani⁴, Ega Anzani⁵

^{1,2,3,4} Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

⁵ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

dyahsuryaningrum@staff.unram.ac.id, alwishb@staff.unram.ac.id, farahainunjamil@staff.unram.ac.id,

sabulmasani@staff.unram.ac.id, egaanzani@staff.unram.ac.id

Abstract

The Village/Urban Village Merah Putih Cooperative (KDKMP) is a strategic government program aimed at strengthening community-based economic institutions at the village and urban village levels. In urban areas, KDKMP development needs to be adjusted to the socio-economic characteristics and local potential of each area. This study aims to identify local potential, analyze business opportunities, and examine the development direction of KDKMP in Mataram City. The study employed a descriptive qualitative approach with a comparative descriptive design in three urban villages: Cakranegara Barat, Monjok Timur, and Abian Tubuh Baru. Data were collected through semi-structured interviews, field observations, and document review, and were analyzed through data reduction, thematic categorization, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the three urban villages have different local potential characteristics. Cakranegara Barat has business opportunities in trade, goods distribution, and transportation services; Monjok Timur is more relevant for MSME support, services, trade, and digital marketing; while Abian Tubuh Baru has opportunities in local product distribution, basic goods, tofu-tempeh home industries, weaving, culinary products, and tourism potential. These findings confirm that KDKMP business development in urban areas cannot rely on a uniform model but must be designed contextually based on local potential. KDKMP should also be positioned as an institution that strengthens the local business ecosystem rather than competing with existing local enterprises. Local-potential-based KDKMP development contributes to inclusive economic strengthening, sustainable urban development, and stakeholder partnerships.

Keywords: Red And White Cooperative; KDKMP; Local Potential; Urban Cooperative; Business Opportunities

Abstrak

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan program strategis pemerintah yang diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dalam konteks wilayah urban, pengembangan KDKMP perlu disesuaikan dengan karakter sosial ekonomi dan potensi lokal masing-masing wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi lokal, menganalisis peluang usaha, dan mengkaji arah pengembangan KDKMP di Kota Mataram. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan deskriptif-komparatif pada tiga kelurahan, yaitu Cakranegara Barat, Monjok Timur, dan Abian Tubuh Baru. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis melalui reduksi data, kategorisasi tematik, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kelurahan memiliki karakter potensi lokal yang berbeda. Cakranegara Barat memiliki peluang usaha pada sektor perdagangan, distribusi barang, dan jasa transportasi; Monjok Timur lebih relevan diarahkan pada dukungan UMKM, jasa, perdagangan, dan pemasaran digital; sedangkan Abian Tubuh Baru memiliki peluang pada distribusi produk lokal, sembako, tahu-tempe, tenun, kuliner, dan potensi wisata. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan usaha KDKMP di wilayah urban tidak dapat menggunakan model seragam, tetapi perlu dirancang secara kontekstual berdasarkan potensi lokal. KDKMP juga perlu diposisikan sebagai penguat ekosistem usaha warga, bukan pesaing usaha lokal. Pengembangan KDKMP berbasis potensi lokal berkontribusi terhadap penguatan ekonomi inklusif, pembangunan urban berkelanjutan, dan kemitraan antar-pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Koperasi Merah Putih; KDKMP; Potensi Lokal; Koperasi Perkotaan; Peluang Usaha.

1. Pendahuluan

Koperasi memiliki posisi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat karena berlandaskan prinsip kebersamaan, partisipasi anggota, dan penguatan kesejahteraan kolektif. Dalam konteks Indonesia, koperasi tidak

hanya dipandang sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi kerakyatan yang dapat memperkuat akses masyarakat terhadap sumber daya, pasar, dan peluang usaha. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa koperasi berperan dalam pemberdayaan anggota, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan masyarakat berbasis partisipasi (Majee & Hoyt, 2011). Koperasi juga dinilai mampu membangun modal sosial melalui kepemilikan bersama, kerja sama, dan pengambilan keputusan kolektif (Majee & Hoyt, 2010).

Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan koperasi kembali memperoleh perhatian melalui inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). KDKMP merupakan program strategis pemerintah yang didorong melalui percepatan pembentukan koperasi pada tingkat desa dan kelurahan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menegaskan perlunya langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam pembentukan KDKMP. Dalam perkembangannya, pemerintah juga meluncurkan program 80.081 KDKMP sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa dan kelurahan. Konteks ini menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih tidak hanya merupakan inisiatif ekonomi lokal, tetapi juga bagian dari agenda kebijakan nasional yang bersifat akseleratif (Kementerian Sekretaris Negara RI, 2025).

Dalam pembentukannya, KDKMP tidak hanya membutuhkan dukungan legalitas dan kelembagaan, tetapi juga membutuhkan arah usaha yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi ekonomi lokal. Beberapa penelitian menegaskan bahwa dukungan pemerintah, kesiapan sumber daya manusia, pendampingan kelembagaan, dan model pengelolaan yang sesuai dengan konteks lokal menjadi faktor penting dalam fase awal pengembangan koperasi (Mauludin et al., 2025; Rahmi et al., 2025).

Meskipun demikian, pengembangan koperasi di wilayah perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda dari wilayah perdesaan. Masyarakat urban cenderung memiliki struktur sosial yang lebih heterogen, aktivitas ekonomi yang lebih beragam, serta kebutuhan usaha yang lebih dinamis. Di satu sisi, kondisi tersebut membuka peluang bagi koperasi untuk mengembangkan unit usaha berbasis perdagangan, jasa, distribusi, digitalisasi, kuliner, dan ekonomi kreatif. Namun di sisi lain, koperasi urban juga menghadapi tantangan berupa rendahnya interaksi kolektif, pergeseran nilai gotong royong, kebutuhan inovasi digital, dan lemahnya identitas kolektif anggota. Kajian mengenai koperasi perkotaan di Indonesia menunjukkan bahwa koperasi perlu memperkuat daya saing, kapasitas digital, jaringan kolaborasi, dan orientasi bisnis agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat urban (Rustiadi et al., 2018; Wahyuningtyas et al., 2023).

Salah satu pendekatan yang penting dalam pengembangan koperasi urban adalah pemanfaatan potensi lokal sebagai dasar perumusan unit usaha. Potensi lokal dapat berupa sumber daya ekonomi, keterampilan masyarakat, produk unggulan, jaringan pasar, aset budaya, maupun posisi geografis yang memiliki nilai ekonomi. Pengembangan usaha berbasis potensi lokal memungkinkan koperasi tidak hadir sebagai pesaing usaha masyarakat, tetapi sebagai lembaga kolektif yang memperkuat rantai nilai, memperluas pasar, menekan biaya distribusi, dan meningkatkan posisi tawar pelaku usaha lokal. Kajian tentang pengembangan usaha berbasis potensi lokal menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya lokal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pelestarian aset budaya, dan keberlanjutan usaha komunitas (Gilang et al., 2021; Kurniawan & Cahyono, 2020; Mastronardi & Romagnoli, 2020).

Sebagai pusat pemerintahan Provinsi NTB dan salah satu representasi utama perkembangan perkotaan daerah, Kota Mataram memiliki dinamika sosial ekonomi yang cukup beragam. Keragaman tersebut juga tercermin dalam struktur ekonomi kota yang tidak bertumpu pada satu sektor tunggal, tetapi mencakup perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, konstruksi, jasa keuangan, pendidikan, transportasi, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, serta berbagai aktivitas jasa lainnya (BPS Mataram, 2026). Kondisi ini menjadikan Kota Mataram sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji peluang pengembangan KDKMP di wilayah perkotaan, terutama karena koperasi kelurahan perlu menyesuaikan arah usahanya dengan potensi lokal, kebutuhan masyarakat, dan karakter ekonomi masing-masing wilayah.

Sejumlah penelitian menekankan bahwa koperasi berperan dalam memperkuat partisipasi, solidaritas, dan kapasitas ekonomi komunitas, sementara kajian lain menunjukkan pentingnya potensi lokal sebagai dasar pengembangan usaha berbasis masyarakat (Gilang et al., 2021; Majee & Hoyt, 2011; Mastronardi & Romagnoli, 2020). Namun, kajian yang secara khusus menempatkan KDKMP sebagai objek analisis peluang usaha berbasis potensi lokal di wilayah kelurahan perkotaan masih relatif terbatas. Sebagian besar pembahasan mengenai KDKMP masih lebih banyak diarahkan pada aspek pembentukan kelembagaan, dukungan pemerintah, kesiapan sumber daya manusia, legalitas, dan tata kelola awal koperasi (Mauludin et al., 2025; Rahmi et al., 2025).

Wilayah urban memiliki struktur ekonomi yang lebih dinamis, lebih heterogen, dan lebih dekat dengan sektor perdagangan, jasa, UMKM, ekonomi kreatif, serta jaringan distribusi. Oleh karena itu, keberhasilan KDKMP tidak hanya bergantung pada terbentuknya kelembagaan formal, tetapi juga pada ketepatan dalam merumuskan unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal. Dalam hal ini, potensi lokal tidak hanya dimaknai sebagai sumber daya

alam, tetapi juga mencakup keterampilan masyarakat, produk unggulan, jaringan pasar, aset budaya, posisi geografis, dan kebutuhan ekonomi warga perkotaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi lokal yang dapat menjadi dasar pengembangan usaha koperasi, menganalisis bentuk peluang usaha yang relevan dengan karakter wilayah urban, serta mengkaji arah pengembangan usaha KDKMP di Kota Mataram. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian koperasi wilayah urban sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah, pengurus koperasi, dan pemangku kepentingan dalam merancang unit usaha koperasi yang adaptif, kontekstual, dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan deskriptif-komparatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami peluang pengembangan usaha KDKMP berdasarkan potensi lokal pada konteks sosial ekonomi kelurahan perkotaan. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi lapangan secara kontekstual melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, sehingga sesuai untuk mengkaji peluang usaha koperasi yang masih berada pada tahap inisiasi atau pengembangan awal. Dalam kajian koperasi, pendekatan ini banyak digunakan untuk memahami dinamika kelembagaan, strategi usaha, kesiapan sumber daya, peluang pasar, dan kebutuhan pengembangan yang bersifat kontekstual (*Estrada et al., 2017; Fernandes & de Nazaré Aguiar Silva, 2022; Rauf et al., 2023*).

2.1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di tiga kelurahan di Kota Mataram, yaitu Cakranegara Barat, Monjok Timur, dan Abian Tubuh Baru. Ketiga lokasi dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa masing-masing wilayah telah memiliki proses inisiasi atau persiapan KDKMP, serta menunjukkan karakter potensi lokal yang berbeda sebagai dasar pengembangan usaha koperasi. Pemilihan lokasi secara purposif digunakan karena penelitian kualitatif tidak bertujuan melakukan generalisasi statistik, tetapi memahami secara mendalam variasi konteks, potensi, dan peluang pengembangan koperasi pada lokasi yang relevan.

Kota Mataram dipilih sebagai konteks penelitian karena merepresentasikan wilayah urban dengan struktur ekonomi yang beragam. Dalam konteks ini, kelurahan perkotaan tidak dapat dipandang sebagai wilayah yang homogen, sebab masing-masing memiliki karakter sosial ekonomi, aktivitas usaha, dan peluang pasar yang berbeda. Oleh karena itu, tiga kelurahan tersebut diperlakukan sebagai unit kasus komparatif untuk melihat bagaimana peluang usaha KDKMP dapat dirumuskan berdasarkan potensi lokal masing-masing wilayah.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses inisiasi koperasi, kondisi awal kelembagaan, potensi lokal, rencana unit usaha, dukungan pemerintah, serta peluang pengembangan koperasi. Informan utama berasal dari pihak kelurahan/desa atau pihak yang memahami proses pembentukan KDKMP di masing-masing lokasi. Dalam penyajian hasil penelitian, identitas informan dapat ditulis menggunakan kode atau inisial untuk menjaga etika penelitian, misalnya I-CB untuk informan Cakranegara Barat, I-MT untuk informan Monjok Timur, dan I-ATB untuk informan Abian Tubuh Baru.

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai lingkungan sosial ekonomi, aktivitas usaha masyarakat, fasilitas pendukung koperasi, serta konteks lokal yang dapat menjadi dasar pengembangan usaha. Sementara itu, telaah dokumen dilakukan terhadap laporan survei, catatan wawancara, struktur organisasi, dokumen perencanaan, dan informasi pendukung lain yang berkaitan dengan pembentukan KDKMP.

2.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami konteks sosial ekonomi dan organisasi secara mendalam, sehingga dapat menghasilkan strategi pengembangan usaha yang sesuai dengan kondisi lokal (Búrigo, 2024; Ibrahim et al., 2017; Sharnina et al., 2025). Tahap analisis data diawali dengan reduksi data, kategorisasi tematik, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kategori analisis meliputi kondisi awal koperasi, potensi lokal, peluang unit usaha, dukungan pemerintah, dan arah pengembangan usaha. Aspek permodalan hanya dibahas secara umum sebagai bagian dari kondisi pendukung, sehingga analisis utama difokuskan pada potensi lokal dan peluang pengembangan unit usaha KDKMP di wilayah urban.

Analisis dilakukan secara komparatif dengan membandingkan peluang pengembangan usaha pada tiga kelurahan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel komparatif agar hubungan antara potensi lokal, peluang usaha, dan arah pengembangan koperasi dapat terlihat secara sistematis. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen pendukung. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai peluang pengembangan usaha KDKMP berbasis potensi lokal di wilayah urban Kota Mataram.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kondisi Awal Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kota Mataram berada dalam tahap inisiasi dan persiapan awal. Perbedaan tersebut terlihat dari status pembentukan koperasi, kesiapan pengurus, dukungan pemerintah, serta arah rencana usaha yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, dukungan pemerintah menjadi faktor penting karena koperasi belum sepenuhnya memiliki kesiapan operasional, kapasitas manajerial, dan sistem usaha yang matang. Dukungan pemerintah pada fase awal koperasi diperlukan untuk membantu mengatasi keterbatasan regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan kesiapan manajerial di tingkat lokal (Mauludin et al., 2025; Rahmi et al., 2025). Dukungan tersebut juga dapat mendorong penguatan kapasitas kelembagaan dan inovasi apabila diarahkan melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi yang sesuai dengan kebutuhan koperasi (Sulistiyorini et al., 2024).

Di Cakranegara Barat, informan I-CB, selaku Lurah Cakranegara Barat, menerangkan bahwa KDKMP telah mulai dibentuk sejak tahun 2025 sebagai bagian dari program pemerintah pusat. Namun, koperasi tersebut masih berada pada tahap awal dan belum dapat beroperasi secara optimal. Menurut I-CB, dukungan pemerintah telah terlihat dari adanya dorongan pembentukan koperasi, tetapi pada tingkat pelaksanaan masih diperlukan penguatan fasilitas operasional, perluasan keanggotaan, dan pendampingan agar koperasi mampu menjalankan unit usaha secara efektif. Saat ini, KDKMP di Cakranegara Barat belum memiliki gedung operasional tetap dan masih membutuhkan penguatan kelembagaan, fasilitas, serta rencana usaha yang lebih konkret. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan kebijakan dari pemerintah pusat belum otomatis menghasilkan kesiapan operasional pada tingkat kelurahan. Kebijakan koperasi yang bersifat terpusat perlu diterjemahkan secara hati-hati pada level lokal agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kapasitas pelaksanaannya ((Mauludin et al., 2025).

Sedangkan di Monjok Timur, informan I-MT, selaku Lurah Monjok Timur, menerangkan bahwa proses pengembangan KDKMP telah diawali melalui sosialisasi kepada masyarakat dan musyawarah pembentukan koperasi di kantor kelurahan. Pengurus koperasi juga telah dibentuk melalui mekanisme musyawarah, sedangkan pemerintah kelurahan memberikan dukungan terhadap proses awal tersebut. Namun, koperasi masih berada pada tahap pra-operasional karena masih perlu menyelesaikan aspek legalitas, administrasi, serta penyiapan fasilitas dan rencana unit usaha. Dukungan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah, dinas terkait, dan lembaga keuangan, diperlukan dalam bentuk pembinaan, pelatihan, dan akses penguatan kelembagaan, meskipun implementasinya masih memerlukan tindak lanjut. Dalam hal ini, kesiapan sumber daya manusia menjadi isu penting dalam implementasi KDKMP, sehingga dukungan pemerintah tidak cukup berupa instruksi pembentukan, tetapi perlu dilengkapi dengan pelatihan, pendampingan teknis, dan penguatan kapasitas pengurus (Rahmi et al., 2025).

Sementara itu, informan I-ATB, selaku Lurah Abian Tubuh Baru, menjelaskan bahwa pembentukan KDKMP telah melewati tahap rencana awal karena pengurus sudah dikukuhkan pada 2 Mei 2025. Sosialisasi awal kepada masyarakat juga telah dilakukan oleh pemerintah setempat. Namun, koperasi belum menjalankan kegiatan operasional karena masih menyiapkan administrasi dan unit bisnis. I-ATB juga menyampaikan bahwa dinas terkait telah memberikan arahan mengenai legalitas dan bimbingan kelembagaan, sedangkan dukungan eksternal direncanakan dapat berasal dari program pemerintah, kemitraan, atau lembaga keuangan apabila diperlukan untuk pengembangan unit usaha. Saat ini koperasi telah memiliki struktur pengurus, dengan jumlah anggota yang lebih besar dibandingkan dua lokasi lain, dan fasilitas koperasi sedang dikembangkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dan kesiapan kelembagaan awal dapat mempercepat proses inisiasi koperasi, tetapi belum cukup untuk menjamin operasionalisasi usaha apabila belum disertai dengan penguatan administrasi, manajemen, dan pemilihan unit usaha yang sesuai. Oleh karena itu, dukungan pemerintah akan lebih efektif apabila dikombinasikan dengan kepemimpinan, inovasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan local (Sulistiyorini et al., 2024).

Berdasarkan tiga lokasi tersebut, dukungan pemerintah pada tahap inisiasi KDKMP dapat dipahami dalam tiga bentuk utama. Pertama, dukungan regulatif, yaitu arahan pembentukan koperasi, proses legalitas, dan fasilitasi

administratif. Kedua, dukungan kelembagaan, yaitu fasilitasi sosialisasi, musyawarah, pembentukan pengurus, dan pendampingan awal. Ketiga, dukungan kapasitas, yaitu pelatihan, pembinaan, penguatan manajemen, dan pendampingan dalam merumuskan unit usaha. Literatur menunjukkan bahwa koperasi pada tahap awal sering menghadapi keterbatasan pendidikan, pelatihan formal, pengalaman manajerial, dan infrastruktur pendukung, sehingga dukungan pemerintah melalui pelatihan dan asistensi kelembagaan menjadi penting (Mauludin et al., 2025; Rahmi et al., 2025).

Sebagai program yang digerakkan oleh kebijakan pemerintah, pola ini berbeda dari pembentukan koperasi yang sepenuhnya tumbuh dari kebutuhan kolektif anggota secara organik. Dalam konteks KDKMP, dorongan awal berasal dari agenda percepatan pemerintah, sedangkan partisipasi warga, kesiapan pengurus, dan pemilihan unit usaha masih perlu dibangun secara bertahap di tingkat lokal. Kondisi ini tidak berarti bahwa program tersebut bertentangan dengan prinsip koperasi, tetapi menunjukkan adanya kebutuhan untuk menjembatani pendekatan kebijakan yang bersifat top-down dengan prinsip koperasi yang menekankan partisipasi, kepemilikan anggota, dan pengambilan keputusan kolektif.

Namun, dukungan pemerintah juga perlu dikelola secara hati-hati agar tidak terlalu bersifat *top-down*. Model kebijakan yang terlalu terpusat berisiko menimbulkan ketidaksesuaian struktural antara desain program dan kebutuhan lokal (Mauludin et al., 2025). Selain itu, dukungan pemerintah yang terlalu dominan dapat menghasilkan koperasi yang secara administratif terbentuk, tetapi tidak memberikan manfaat substantif bagi anggota apabila tidak ditopang oleh kapasitas lokal dan partisipasi anggota (Chen et al., 2023). Oleh karena itu, dukungan pemerintah dalam inisiasi KDKMP sebaiknya tidak berhenti pada pembentukan formal, tetapi diarahkan pada penguatan kapasitas lokal, pendampingan manajemen, keterlibatan anggota, dan perumusan unit usaha yang sesuai dengan potensi masing-masing kelurahan. Dengan demikian, tahap inisiasi koperasi dapat menjadi pijakan menuju pengembangan usaha yang kontekstual, bukan sekadar pemenuhan administratif program.

3.2. Potensi Lokal Sebagai Basis Peluang Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Potensi lokal menjadi dasar penting dalam merumuskan arah pengembangan usaha KDKMP di wilayah perkotaan. Dalam penelitian ini, potensi lokal tidak hanya dipahami sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai aktivitas ekonomi warga, produk unggulan, keterampilan masyarakat, jaringan pasar, aset budaya, posisi geografis, serta kebutuhan ekonomi sehari-hari. Pendekatan ini penting karena koperasi yang bertumpu pada potensi lokal berpeluang lebih dekat dengan kebutuhan anggota, lebih mudah memperoleh legitimasi sosial, dan lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi setempat. Koperasi yang mengoptimalkan potensi lokal dapat meningkatkan pendapatan anggota dan membuka kesempatan kerja (Sari et al., 2025). Selain itu, koperasi juga dapat memperkuat akses pasar dan stabilitas ekonomi lokal melalui kerja kolektif dan penguatan posisi tawar (Chiwawa et al., 2025).

Cakranegara Barat memiliki karakter sebagai kelurahan urban yang strategis karena berada di kawasan pusat kota dan dekat dengan aktivitas layanan, perdagangan, serta mobilitas masyarakat. Berdasarkan keterangan I-CB, peluang pengembangan koperasi lebih relevan diarahkan pada sektor perdagangan, distribusi barang, dan jasa transportasi. Cakranegara Barat memiliki akses yang relatif mudah terhadap fasilitas publik, pusat komersial, dan sektor jasa sehingga pengembangan usaha koperasi lebih tepat diarahkan pada layanan yang mendukung mobilitas dan kebutuhan ekonomi perkotaan. Dalam konteks ini, koperasi tidak harus membangun usaha yang sepenuhnya baru, tetapi dapat memperkuat fungsi distribusi, pengadaan barang, dan layanan kolektif bagi warga. Koperasi juga dapat memperluas akses pasar dan mengurangi biaya melalui mekanisme kolektif (Chiwawa et al., 2025).

Sedangkan di Monjok Timur, karakter ekonomi masyarakat lebih dekat dengan kegiatan UMKM, perdagangan, dan jasa. Wilayah ini merupakan kelurahan urban dengan masyarakat yang heterogen dan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Menurut I-MT, memiliki potensi ekonomi yang mengarah pada UMKM, perdagangan, jasa, serta pengembangan pemasaran berbasis digital. Berdasarkan kondisi tersebut, peluang KDKMP di Monjok Timur lebih tepat diarahkan sebagai lembaga pendukung UMKM, misalnya melalui promosi produk, pemasaran kolektif, layanan usaha, dan penguatan jejaring pasar. Pengembangan kewirausahaan UMKM yang diselaraskan dengan kebijakan lokal dapat memperkuat daya saing usaha masyarakat (Latianingsih et al., 2022).

Sementara itu, di Abian Tubuh Baru, potensi lokalnya tidak hanya terkait dengan kebutuhan pokok, tetapi juga dengan produk rumah tangga, kuliner, ekonomi kreatif, dan peluang wisata. I-ATB menyampaikan bahwa koperasi dapat diarahkan untuk mendukung pemasaran tenun, menampung produk *home industry* seperti tahu dan tempe, mengembangkan kuliner lokal, serta menangkap peluang ekonomi dari sektor pariwisata. Wilayah ini memiliki basis ekonomi rumah tangga yang kuat, terutama industri tahu dan tempe, perdagangan kecil, serta usaha pangan

lokal. Pemberdayaan berbasis potensi lokal dapat menggerakkan partisipasi masyarakat sekaligus menjaga nilai budaya dan produk lokal (Kurniawan & Cahyono, 2020).

3.3 Peluang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Di Kota Mataram

Berdasarkan perbandingan kondisi di tiga lokasi di Kota Mataram (Tabel 1) menunjukkan bahwa potensi lokal kelurahan perkotaan tidak bersifat seragam. Cakranegara Barat lebih menonjol pada potensi perdagangan, distribusi, dan jasa transportasi; Monjok Timur pada UMKM, jasa, perdagangan, dan digitalisasi; sedangkan Abian Tubuh Baru pada produk pangan lokal, kuliner, ekonomi kreatif, dan peluang wisata. Perbedaan ini menegaskan bahwa pengembangan KDKMP perlu disusun secara kontekstual. Kerja sama antar-pelaku usaha lokal dapat memperkuat ketahanan sistem ekonomi lokal (Zwolińska-Ligaj & Guzal-Dec, 2023). Selain itu, koperasi yang memiliki kepedulian terhadap komunitas dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lokal (Vo, 2016).

Tabel 1. Peluang Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Cakranegara Barat, Monjok Timur dan Abian Tubuh Baru berdasarkan Karakter Potensi Lokal

Kelurahan	Karakter Potensi Lokal	Peluang Usaha
Cakranegara Barat	Lokasi urban strategis, perdagangan, mobilitas masyarakat	Perdagangan, distribusi barang, jasa transportasi
Monjok Timur	UMKM, perdagangan, jasa, potensi digital	Dukungan UMKM, jasa, perdagangan, pemasaran digital
Abian Tubuh Baru	Tahu-tempe, sembako, tenun, kuliner lokal, potensi wisata	Distribusi produk lokal, sembako, ekonomi kreatif, kuliner wisata

Namun, pemanfaatan potensi lokal juga perlu dilakukan secara hati-hati agar koperasi tidak justru menjadi pesaing bagi usaha kecil yang sudah ada. Badan usaha berbasis desa atau komunitas berpotensi menghadapi dilema antara membangun kemitraan atau menciptakan persaingan dengan pelaku usaha lokal (Effendi et al., 2023). Oleh karena itu, KDKMP sebaiknya ditempatkan sebagai lembaga yang memperkuat ekosistem usaha warga, misalnya melalui pengadaan bersama, distribusi kolektif, pemasaran bersama, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pasar. Selain itu, penguatan manajemen rantai pasok pada lembaga usaha desa juga perlu dilakukan agar potensi lokal dapat dikelola secara lebih efektif (Saputra, 2020).

Dengan demikian, potensi lokal menjadi titik awal yang menentukan arah pengembangan usaha KDKMP. Koperasi tidak seharusnya hadir sebagai lembaga usaha yang menggantikan aktivitas ekonomi warga, tetapi sebagai wadah kolektif yang memperkuat usaha yang sudah ada, menghubungkan pelaku ekonomi lokal dengan pasar, dan menyediakan layanan bersama bagi anggota. Dalam kerangka ini, pengembangan koperasi berbasis potensi lokal dapat menjadi strategi agar KDKMP di wilayah urban lebih adaptif, realistis, dan berkelanjutan.

3.4 Relevansi Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Pengembangan KDKMP berbasis potensi lokal juga memiliki relevansi dengan agenda pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks ekonomi perkotaan. SDG 8 menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan produktif, kewirausahaan, kreativitas, inovasi, serta pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam konteks penelitian ini, KDKMP dapat berkontribusi terhadap agenda tersebut apabila unit usaha yang dikembangkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi warga, membuka akses pasar, mendukung UMKM, dan menciptakan layanan ekonomi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat urban.

Relevansi tersebut terlihat pada peluang koperasi untuk memperkuat sektor perdagangan, jasa, distribusi, produk rumah tangga, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara tepat, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi anggota, tetapi juga dapat menjadi instrumen yang memperkuat ekosistem usaha lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip SDG 8 yang tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas pertumbuhan yang inklusif dan memberi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang. Dalam konteks kelurahan urban, koperasi dapat membantu memperkuat kegiatan ekonomi skala mikro melalui pemasaran bersama, pengadaan bersama, distribusi kolektif, serta perluasan jejaring usaha.

Selain itu, pengembangan KDKMP di kelurahan perkotaan juga berkaitan dengan SDG 11, yaitu upaya membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Koperasi yang berbasis potensi lokal dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan kota yang lebih inklusif karena memberi ruang bagi warga untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi kolektif. Pada wilayah urban yang memiliki struktur sosial ekonomi

heterogen, koperasi dapat menjadi wadah yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelaku UMKM, rumah tangga produktif, pedagang kecil, dan komunitas ekonomi kreatif.

Keterkaitan lain juga terlihat pada SDG 17, terutama dalam aspek kemitraan. Pengembangan KDKMP tidak dapat hanya bergantung pada pengurus dan anggota, tetapi membutuhkan kerja sama dengan pemerintah kelurahan, dinas terkait, lembaga keuangan, pemasok, pelaku usaha lokal, dan mitra pasar. Kemitraan tersebut penting agar koperasi memiliki dukungan legalitas, kapasitas manajerial, akses distribusi, dan jaringan pemasaran. Dengan demikian, koperasi dapat berfungsi sebagai simpul kolaborasi ekonomi lokal yang menghubungkan program pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan menempatkan KDKMP dalam kerangka SDGs, pengembangan koperasi di wilayah urban tidak hanya dipahami sebagai pembentukan lembaga ekonomi baru, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan lokal yang inklusif. Namun, kontribusi terhadap SDGs hanya akan tercapai apabila koperasi mampu beroperasi secara substantif, memiliki unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal, dan dikelola secara partisipatif. Oleh karena itu, agenda keberlanjutan perlu diterjemahkan ke dalam strategi yang konkret, seperti pemilihan unit usaha berbasis potensi kelurahan, pendampingan anggota, penguatan kemitraan, dan pengembangan pasar lokal.

4. Kesimpulan

Peluang pengembangan usaha KDKMP di Kota Mataram sangat ditentukan oleh kemampuan koperasi membaca dan memanfaatkan potensi lokal masing-masing kelurahan. Pada wilayah urban, potensi lokal tidak hanya berbentuk sumber daya alam, tetapi juga mencakup aktivitas perdagangan, jasa, UMKM, produk rumah tangga, kuliner, ekonomi kreatif, jaringan distribusi, dan akses pasar. Oleh karena itu, pengembangan usaha KDKMP tidak dapat dilakukan dengan model yang seragam, melainkan perlu disesuaikan dengan karakter sosial ekonomi setiap wilayah. Dukungan pemerintah pada tahap inisiasi KDKMP penting dalam bentuk sosialisasi, fasilitasi legalitas, pembentukan pengurus, dan pendampingan kelembagaan. Namun, dukungan tersebut perlu dilanjutkan dengan penguatan kapasitas pengurus dan pendampingan pemilihan unit usaha agar koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif. KDKMP sebaiknya diposisikan sebagai lembaga yang memperkuat usaha warga melalui pengadaan bersama, pemasaran kolektif, distribusi, dan perluasan akses pasar, bukan sebagai pesaing bagi pelaku usaha lokal. Pengembangan KDKMP berbasis potensi lokal juga relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan ekonomi perkotaan, dan kemitraan antar-pemangku kepentingan. Kontribusi tersebut hanya dapat tercapai apabila koperasi tidak berhenti sebagai program administratif, tetapi berkembang menjadi lembaga usaha kolektif yang dikelola secara partisipatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi lokal.

Reference

- BPS Mataram. (2026). Produk Domestik Regional Bruto Kota Mataram Menurut Lapangan Usaha. <https://mataramkota.bps.go.id/Id/Statistics-Table/3/Uzfstvxxullime5xyzbznuwwnvfra3h6y1d3m1p6mdkjmw==/Produk-Domestik-Regional-Bruto-Atas-Dasar-Harga-Berlaku-Menurut-Lapangan-Usaha---Di-Kota-Mataram--Miliar-Rupiah---2023.Html?Year=2023>
- Búrigo, F. L. (2024). Cooperative Societies Of Collective Interest (Scic): Inspiration For The Brazilian Cooperativism Of The Future? *Revista De Economia E Sociologia Rural*, 62(3). <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2023.284695>
- Chen, F., Xu, Z., & Luo, Y. (2023). False Prosperity: Rethinking Government Support For Farmers' Cooperatives In China. *Annals Of Public And Cooperative Economics*, 94(3), 905–920. <https://doi.org/10.1111/Apce.12420>
- Chiwawa, J., Naidoo, V., & Darwish, S. (2025). The Transformative Role Of Agricultural Cooperatives In Sustaining Rural Economies In Kwazulu-Natal, South Africa. In *Studies In Systems, Decision And Control* (Vol. 586, Pp. 1085–1095). https://doi.org/10.1007/978-3-031-87550-2_67
- Effendi, S. A., Sukoharsono, E. G., & Purwanti, L. (2023). Building Partnership Or Competition: Village Business Sustainability In Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 15(18). <https://doi.org/10.3390/Su151813703>
- Estrada, H. H., Saumett, H. G., & Bahamón, M. J. (2017). Strategic Direction And Organizational Learning In Productive Units Associated With Cooperatives In The Agricultural Sector Of The Colombian Atlantic. *Espacios*, 38(37). <https://www.scopus.com/Inward/Record.Uri?Eid=2-S2.0-85027332848&Partnerid=40&Md5=De4b8958f34027b2b65d9a00e8e60e2c>
- Fernandes, J. A. F., & De Nazaré Aguiar Silva, L. (2022). Business Strategy Of Four Small Chilean Agricultural Cooperatives For Rural Development. *Desenvolvimento E Meio Ambiente*, (60), 567–589. <https://doi.org/10.5380/Dma.V60i0.75895>
- Gilang, M. I., Maryuni, Y., & Lindawati, Y. I. (2021). Locality Development Model: Analysis On Community Strength In Planning Business Capacity Development In Panyabangan Village Based On Local Potentials Historical Buildings Of Bendungan Lama Pamarayan. *IOP Conference Series: Earth And Environmental Science*, 747(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/747/1/012015>

- Ibrahim, F., Frisdiantara, C., & Wekke, I. S. (2017). Differentiation Strategy Of Islamic Micro Finance Institutions In Malang. *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 12(15), 3865–3869. <https://doi.org/10.3923/Jeasci.2017.3865.3869>
- Kurniawan, M. U., & Cahyono, A. E. (2020). The Community Empowerment Program Based On Local Potential Through Tourism Village. *IOP Conference Series: Earth And Environmental Science*, 485(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/485/1/012089>
- Latianingsih, N., Mariam, I., Rudatin, C. L., Usmanij, P., & Ratten, V. (2022). Aligning Strategic MSME Entrepreneurship To Local Government Policy: A Case Study Of A Tourism Village In Bogor Indonesia. In *Contributions To Management Science* (Pp. 21–33). https://doi.org/10.1007/978-3-030-87112-3_3
- Majee, W., & Hoyt, A. (2011). Cooperatives And Community Development: A Perspective On The Use Of Cooperatives In Development. *Journal Of Community Practice*, 19(1), 48–61. <https://doi.org/10.1080/10705422.2011.550260>
- Majee, W., & Hoyt, A. (2010). Are Worker-Owned Cooperatives The Brewing Pots For Social Capital? *Community Development*, 41(4), 417–430. <https://doi.org/10.1080/15575330.2010.488741>
- Mastronardi, L., & Romagnoli, L. (2020). Community-Based Cooperatives: A New Business Model For The Development Of Italian Inner Areas. *Sustainability (Switzerland)*, 12(5). <https://doi.org/10.3390/Su12052082>
- Mauludin, N. A., Wahyudi, A., & Ulum, H. (2025). Legal Policy Model Of The Red And White Village Cooperative (KDMP): Implementation Factors And Comparative Insights From Brazil, Denmark, And Japan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 13(3), 682–707. <https://doi.org/10.29303/lus.V13i3.1894>
- Rahmi, R., Azhari, A., & Jamaluddin, J. (2025). Readiness Of Village Human Resources In Implementing The Red And White Cooperative. *International Journal Of Accounting And Economics Studies*, 12(5), 145–153. <https://doi.org/10.14419/Bfp4bp88>
- Rauf, R., Prayuda, R., & Munaf, Y. (2023). Model Of Government Development For Msmes Through One Village One Product (OVOP) Concept By The Cooperatives And Msmes Office In Rokan Hilir Regency. *International Journal Of Sustainable Development And Planning*, 18(2), 635–640. <https://doi.org/10.18280/Ijsdp.180234>
- RI, K. S. N. (2025). Inilah Inpres 9/2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inilah Inpres 9/2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. https://setneg.go.id/baca/index/inilah_inpres_9_2025_tentang_percepatan_pembentukan_koperasi_desa_kelurahan_merah_putih
- Rustiadi, S., Kusumahdinata, B. M., Rahman, A., & Arsandi, I. (2018). Creative Business Community Engagement Model Within The Quadruple Helix: A Preliminary Report Of The Circular Community In Bandung, Indonesia. *International Journal Of Business*, 23(1), 53–62. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-S2.0-85041750193&partnerid=40&md5=84d600ac67a48e0c4525da0699be6f3a>
- Saputra, J. (2020). A Study Of Supply Chain Management Aspects Of Village Owned Enterprises In Indonesia. *International Journal Of Supply Chain Management*, 9(3), 1221–1229. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-S2.0-85087768011&partnerid=40&md5=3985471a7875a17fddcb629d55560dfe>
- Sari, M., Alfarizi, W., Dini, L. R., & Syabani, M. F. (2025). Empowering Coastal Fisheries Through Cooperatives: A Case Study Of Bahari Indah Perkasa Cooperative In Mlaten Village, Pasuruan Regency, Indonesia. *Egyptian Journal Of Aquatic Biology And Fisheries*, 29(4), 2423–2435. <https://doi.org/10.21608/Ejabf.2025.448360>
- Sharnina, N. M., Ignatyev, V. G., Khvalyova, N. V., Galantseva, I. V., & Pavlova, Y. Y. (2025). Features Of Sustainable Development And Green Growth Of Cooperative Business In The Conditions Of Economic Transformation. In *Advances In Science, Technology And Innovation: Part F354* (Pp. 311–316). https://doi.org/10.1007/978-3-031-83041-9_52
- Sulistiyorini, H., Setiawan, M., & Wijayanti, R. (2024). Empowering Village-Owned Enterprises: Examining Leadership, Innovation And Government Support. *International Journal Of Innovative Research And Scientific Studies*, 7(2), 816–829. <https://doi.org/10.53894/Ijirss.V7i2.2909>
- Vo, S. (2016). Concern For Community: A Case Study Of Cooperatives In Costa Rica. *Journal Of Community Practice*, 24(1), 56–76. <https://doi.org/10.1080/10705422.2015.1127304>
- Wahyuningtyas, R., Disastra, G., & Rismayani, R. (2023). Toward Cooperative Competitiveness For Community Development In Economic Society 5.0. *Journal Of Enterprising Communities*, 17(3), 594–620. <https://doi.org/10.1108/JEC-10-2021-0149>
- Zwolińska-Ligaj, M. A., & Guzal-Dec, D. J. (2023). COOPERATIVE LINKS BETWEEN BUSINESSES IN THE CONTEXT OF LOCAL SYSTEM RESILIENCE. A CASE STUDY OF POLAND'S PERIPHERAL REGIONS. *Annals Of The Polish Association Of Agricultural And Agribusiness Economists*, 25(1), 325–340. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.2287>